



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

UN- 1422/Polhukam/De-III/HK.0494/1/11/2016



Kepada Yth.

Koordinator "FOR BALI"

Jl. Sedap Malam No. 234, Kesiman
Denpasar - Bali

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta 10110 Telepon (021) 3521121, 3520145



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612**

Nomor : Un-1422/Polhukam/De-III/HK.04.04.1/11/2016 Jakarta, 8 November 2016
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 lembar.
Hal : Undangan rapat koordinasi.

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Mendasari surat PT. Tirta Wahana Bali Internasional Nomor: 085/TWBI/LGL/L/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, perihal Permohonan Penegakan Hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam akan menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, dimohon kesediaan bapak/ibu dapat menghadiri acara dimaksud yang akan dilaksanakan:

pada hari, tanggal : Selasa, 15 November 2016
waktu : pukul 09.30 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat Nakula Lt.6 Gd. A Kemenko Polhukam
Jl. Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat
pimpinan : Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidkor Hukum dan HAM
Kemenko Polhukam,



Jhoni Ginting, S.H., M.H

Tembusan:

1. Sesmenko Polhukam;
2. Karo Sidhal.

Konfirmasi kehadiran melalui telp/fax: (021) 3524225

Lampiran Surat Undangan

Nomor : Un-1422 /Polhukam/De-III/04.04.1/11/2016

Tanggal : 8 November 2016

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI UNDANGAN

1. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali;
4. Kepala Badan Pertanahan Prov. Bali;
5. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Bali;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Bali;
7. Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Pemerintah Kota Denpasar;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Bali;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Badung;
10. Ketua Forum Peduli Mangrove Bali;
11. Dirut PT. Tirta Wahana Bali Internasional;
12. Koordinator "For Bali";
13. Majelis Utama Desa Pakraman di Bali;
14. Parisada Hindu Dharma Indonesia di Bali;
15. Yayasan Bumi Bali Bagus di Bali;
16. Sekretaris Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam;
17. Para Asdep Kedeputusan Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.